



P-RENJA 2025

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna memenuhi kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik maka perlu kiranya disusun P-Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dan evaluasi pada program/kegiatan tahun anggaran 2024 dan 2025 sampai dengan triwulan II. Dengan disusunnya P-Renja 2025 tersebut maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan telah tersusunnya P-Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam mengemban tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

di Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati yang telah ditetapkan.

Blitar, Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701111 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	10
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Rencana Kerja.....	22
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	23
3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	24
3.2 Pendanaan	28
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

P-Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. P-Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. P-Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena P-Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. P-Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan P-Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan P-Renja PD dimulai dengan persiapan evaluasi pada P-Renja PD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi P-Renja PD tahun berjalan.

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan P-RKPD sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki P-Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada P-RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

P-RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. Sesuai amanat tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun P-Renja PD tahun 2025. P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan DPMPTSP yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan P-RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2025.

Keterkaitan P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam P-Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan P-RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2039;
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E);

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam perencanaan PD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam P-Renja PD dan RKA-P PD. Sedangkan Tujuan penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara P-Renja PD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada PD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi P-Renja PD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja
 - 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Pendanaan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 **Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Kemendagri No 18 Tahun 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan urusan penanaman modal. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut merupakan sasaran strategis dan program yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2025:

1. Sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sasaran ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Sasaran ***Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Blitar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 belum rilis dari Tim Evaluator. Sementara tahun 2024 target Nilai dan Predikat SAKIP 79,75 dan predikat BB terealisasi 75,21 dengan predikat BB capaiannya adalah 94,30%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2025 dengan target 91 terealisasi 89,75 sampai dengan triwulan II; sedangkan IKM pada tahun 2024 dengan target 89 terealisasi 89,53 dengan tingkat capaian 102,90%.
3. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar Tahun 2025 dengan target 20% sampai dengan triwulan II sebesar 49,42 % dengan investasi 2.260,3 Miliar sehingga total akumulasi realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan 2025 triwulan II sebesar 19.005,3 Miliar.

Tabel 2.1.1
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode
Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET 2025	REALISASI 2025 sd TW II
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,50 dan A	80,25 dan A	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	93	91	89,75
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	20%	49,42 %

Tabel 2.1.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahu n 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tercapai ya Realisasi Penanam an Modal		Tercapai nya Realisasi Penanam an Modal	9700 M	13500 M	18200 M	21700 M	11774 M	14702 M	18200 M	2170 0M	Tahun 2025 s/d TW II : 2.260.39 4.089

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengevaluasi realisasi kinerja tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2025 sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD.

DPMPTSP mendukung **Misi Bupati yang kedua** mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha dan **Misi Bupati yang ketiga** yaitu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Indikator Kinerja Utama yang ada di DPMPTSP sudah mendukung pencapaian Misi Bupati.

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama ada beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan target yang direncanakan tidak tercapai. **Pada Tahun 2025 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :**

- 1) Ada beberapa dokumen yang belum sesuai sehingga mempengaruhi Nilai SAKIP menurun;
- 2) Integrasi sistem Kementerian dalam OSS sering bermasalah sehingga terhambatnya pelayanan;
- 3) Setiap perubahan implementasi OSS tidak disosialisasikan oleh BKPM ke daerah dengan jelas sehingga mengundang permasalahan dengan pelaku usaha;

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- 1) Melakukan perbaikan dan pemenuhan dokumen SAKIP;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan masalah dengan BKPM;
- 3) Terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi IT dalam memperlancar perizinan;
- 4) Terus melakukan koordinasi dan peningkatan SDM yang dilakukan secara virtual atau online;

Isu Strategis Tahun 2025:

- 1) Potensi wisata alam dan buatan;
- 2) Potensi SDM (angkatan kerja tinggi);
- 3) Potensi Sumber Daya Alam (Kelapa dll);
- 4) JLS sudah terhubung dari Pantai Tambak-Kecamatan Wonotirto ke Pantai Serang-Kecamatan Panggungrejo;
- 5) Rencana pembangunan TOL;

Permasalahan:

- 1) Letak geografis Kabupaten Blitar tidak berada pada jalur utama perdagangan dan industri;
- 2) Masyarakat Kabupaten Blitar tidak terlalu antusias terhadap industri besar.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025:

- 1) Meningkatkan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata;

- 2) Meningkatkan Promosi Investasi di Bidang Industri Ramah Lingkungan.

Langkah-langkah/strategi Tahun 2025:

- 1) Menyusun IPRO sektor pariwisata, IPRO sektor Industri berbahan dasar Sumber Daya Alam yang potensial di Kabupaten Blitar seperti Pohon Kelapa menjadi Gula Palembang;
- 2) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (Bappeda Litbang, Disperindag, Dinkop, Disnaker, Dinas Pertanian) untuk menyusun perencanaan peta investasi dan software pendukung (peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dan perencanaan investasi);
- 3) Meningkatkan Promosi Investasi;
- 4) Meningkatkan Kemudahan Berusaha.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan penanaman modal melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mendapat pagu sebesar Rp. 6.957.341.905,- dan ada penambahan anggaran PAK Rp. 750.611.458 total pagu menjadi Rp. 7.707.953.363 sampai dengan triwulan II realisasi sebesar Rp. 2.251.737.337,00,- atau 29,22%. Dengan demikian jumlah pagu anggaran yang belum diserap sebesar Rp. 5.456.216.026,-, atau 70,78%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan. Kegiatan rehab gedung

sedang dalam proses pekerjaan untuk masa waktu pekerjaan samapai dengan triwulan VI;

2. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal belum terealisasi untuk output program dan kegiatannya karena peraturan daerah penanaman modal belum disahkan. Untuk kegiatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi dalam proses peyusunan IPRO;
3. Program Promosi Penanaman Modal sudah dilaksanakan untuk kegiatan promosi di papan baliho DPMPTSP yang terdapat di 12 titik kecamatan;
4. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebesar 50,51% dengan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 7.264 izin sedangkan jumlah izin yang terlayani sebesar 7.264 izin;
5. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sesuai target untuk pelaksanaan monev pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan atau pelaku usaha. Untuk realisasi investasi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebesar 2.260.3 Miliar. Sehingga jumlah realisasi investasi dari tahun 2018 sd. Tahun 2025 triwulan II adalah sebesar 15.855.8 Miliar (dengan rincian realisasi investasi sd. 2024 sebesar 15.853.6 Miliar);
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sudah disusun dokumen laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada semester I.

Tabel 2.3

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2025 s/d Triwulan II**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	35.215.067.185,00	100	9.983.563.856,00	100	8.494.029.426,00	71,42	983.249.774,00	71,42	958.231.313,00	0,00	0,00	71,42	1.938.265.287,00	71,42	29,85	71,42	11.921.829.143,00	71,42	71,42	11.921.829.143,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	79	83.965.900,00	31	9.979.665,00	16	2.880.000,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	49,37	0,00	39	9.979.665,00	49,37	11,89	9.979.665,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
3	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	48.775.900,00	20	0,00	10	1.800.000,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	50,00	0,00	25	0,00	50,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
4	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	35.190.000,00	11	9.979.665,00	6	1.080.000,00	3	0,00	1	0,00	0,00	4	0,00	50,00	0,00	15	9.979.665,00	50,00	28,36	9.979.665,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
5	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	10	18.494.872.663,00	4	6.065.004.215,00	2	3.015.147.326,00	862.893.956,00	1	795.501.699,00	0,00	0,00	1.658.395.655,00	40,00	55,00	4	7.723.399.870,00	40,00	41,76	7.723.399.870,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
6	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	18.300.845.013,00	23	5.996.404.215,00	19	2.985.987.326,00	23	862.893.956,00	23	788.211.699,00	0,00	0,00	46	1.651.105.655,00	46,00	55,30	69	7.647.509.870,00	46,00	41,79	7.647.509.870,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
7	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	193.227.650,00	21	68.600.000,00	12	29.160.000,00	3	0,00	7.290.000,00	0,00	0,00	3	7.290.000,00	40,00	25,00	24	75.890.000,00	40,00	39,27	75.890.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan/Output/ Sub Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	KI		Kr	Rp
8	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30	476.690.400,00	23.50	281.980.000,00	26	194.710.400,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	88.33	0,00	26.5	281.980.000,00	88.33	59.15	281.980.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
9	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	109.890.400,00	1	65.340.000,00	19	44.550.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100.00	0,00	1	65.340.000,00	100.00	59.46	65.340.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
10	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	366.800.000,00	46	216.640.000,00	19	150.160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	51.11	0,00	46	216.640.000,00	51.11	59.06	216.640.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
11	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	60	2.188.993.322,00	24	613.975.373,00	12	309.122.556,00	3	3.321.700,00	3	66.266.928,00	0,00	0,00	6	66.372.828,00	50.00	21,47	30	680.348.201,00	50.00	31,08	680.348.201,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
12	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	97.000.000,00	2	7.832.500,00	1	632.000,00	1	1.054.600,00	1	871.600,00	0,00	0,00	2	1.926.200,00	80.00	304,78	4	9.758.700,00	80.00	10,06	9.758.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
13	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	460.336.000,00	2	225.414.020,00	2	105.131.550,00		0,00	1	13.360.000,00	0,00	0,00	1	13.360.000,00	60.00	12,71	3	238.774.020,00	60.00	51,87	238.774.020,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
14	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	112.000.000,00	2	20.361.500,00	1	7.675.200,00	1	2.267.100,00	1	1.485.000,00	0,00	0,00	2	3.752.100,00	80.00	48,89	4	24.113.600,00	80.00	21,53	24.113.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
15	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	54.075.000,00	2	11.624.000,00	1	10.029.800,00		0,00	1	3.215.800,00	0,00	0,00		0,00	40.00	0,00	2	11.624.000,00	40.00	21,50	11.624.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
16	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1800	24.082.235,00	660	4.127.000,00	360	2.352.000,00		0,00	90	414.000,00	0,00	0,00	90	414.000,00	41.67	17,60	750	4.541.000,00	41.67	18,86	4.541.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
17	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	1.441.500.087,00	130	344.616.353,00	75	168.602.000,00		0,00	30	46.920.528,00	0,00	0,00	30	46.920.528,00	53.33	27,83	160	391.536.881,00	53.33	27,16	391.536.881,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Ranstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RP.JMD/Ranstra		Realisasi Capaian Kinerja Ranstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Ranstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12				15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	KI	Kr	Rp			
18	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	12	14.700.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
19	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	4.951.055.000,00	16	1.493.772.200,00	4	111.954.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	80,00	0,00	16	1.493.772.200,00	80,00	30,17	1.493.772.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
20	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
21	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	2.000.000.000,00	5	16.717.000,00	10	19.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	12,50	0,00	5	16.717.000,00	12,50	0,84	16.717.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
22	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	2.951.055.000,00	32	1.477.055.200,00	10	92.018.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	76,19	0,00	32	1.477.055.200,00	76,19	50,05	1.477.055.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
23	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	3.095.050.000,00	24	809.550.770,00	12	505.711.732,00	3	82.873.647,00	3	49.450.833,00	0,00	0,00	6	132.324.480,00	60,00	26,17	30	941.875.250,00	60,00	30,43	941.875.250,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
24	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	24.250.000,00	3	4.292.800,00	2	2.835.900,00		200.000,00		400.000,00	0,00	0,00		600.000,00	30,00	21,16	3	4.892.800,00	30,00	20,18	4.892.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
25	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	595.000.000,00	3	145.267.990,00	2	152.619.832,00	20.345.647,00		17.896.833,00	0,00	0,00		38.232.480,00	30,00	25,05	3	183.500.470,00	30,00	30,84	183.500.470,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
26	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	2.475.800.000,00	3	659.989.980,00	12	350.256.000,00	62.328.000,00		31.164.000,00	0,00	0,00		93.492.000,00	30,00	26,69	3	753.481.980,00	30,00	30,43	753.481.980,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
27	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	5.925.239.900,00	24	709.301.633,00	12	2.354.503.318,00	3	34.160.471,00	3	47.011.853,00	0,00	0,00	6	81.172.324,00	50,00	3,45	30	790.473.957,00	50,00	13,34	790.473.957,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan/Output / Sub Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RP-JMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				12				13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K		Rp	Ki
28	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60	920.810.000,00	10	159.815.925,00	5	116.250.000,00	1	18.350.471,00	1	26.283.853,00			2	44.634.324,00	20,00	38,40	12	204.450.249,00	20,00	22,20	204.450.249,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
29	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400	384.429.900,00	160	128.990.000,00	100	72.140.000,00	25	15.810.000,00	23	13.528.000,00			48	29.338.000,00	52,00	40,67	208	158.328.000,00	52,00	41,19	158.328.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
30	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	4.620.000.000,00	4	420.495.708,00	2	2.166.113.318,00		0,00	1	7.200.000,00			1	7.200.000,00	50,00	0,33	5	427.695.708,00	50,00	9,26	427.695.708,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
31	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanam Modal yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,02	988.684.731,00		344.693.394,00	0,02	282.655.400,00		946.000,00		0,00				946.000,00	0,00	0,33		345.639.394,00	0,00	0,00	345.639.394,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
32	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanam Modal yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	58.362.000,00		0,00	2	58.362.000,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
33	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMCN) dengan UMKM di daerah	1	37.030.800,00		0,00	1	37.030.800,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
34	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1	21.331.200,00		0,00	1	21.331.200,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
35	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terkait Peta Potensi Investasi	2	929.722.731,00	2	344.693.394,00	2	224.293.400,00		946.000,00		0,00				946.000,00	100,00	0,42	2	345.639.394,00	100,00	37,18	345.639.394,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
36	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5	929.722.731,00	4	344.693.394,00	1	224.293.400,00		946.000,00		0,00				946.000,00	80,00	0,42	4	345.639.394,00	80,00	37,18	345.639.394,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/(Outcome) / Kegiatan/(Output) / Sub Kegiatan/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PO yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12			15=(14/5)*100% Rp=14							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp						
37	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Sektor Usaha yang Dipromosikan	2	2.457.659.268,00	8	757.770.300,00	2	440.496.100,00																							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi yang Difasilitasi	2	2.457.659.268,00	4	757.770.300,00	2	440.496.100,00	1	506.000,00	2	7.904.000,00	0,00	0,00	1	8.410.000,00	250,00	1,91	5	766.180.300,00	250,00	31,18	766.180.300,00							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
39	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10	2.457.659.268,00	4	757.770.300,00	2	440.496.100,00								8.410.000,00	40,00	1,91	4	766.180.300,00	40,00	31,18	766.180.300,00							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
40	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota																													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Izin yang Diterbitkan	5	2.576.963.410,00	5	801.845.800,00	5	235.767.600,00	5	7.892.000,00	5	143.202.800,00	0,00	0,00	5	151.094.800,00	100,00	64,09	5	952.940.600,00	100,00	100,00	952.940.600,00								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
42	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha yang Terlayani	5	2.576.963.410,00	-13,71	801.845.800,00	5	235.767.600,00	-8,24	7.892.000,00		143.202.800,00	0,00	0,00	-88	151.094.800,00	-2020,00	64,09	-101	952.940.600,00	-2020,00	36,98	952.940.600,00							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
43	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50000	828.481.705,00	29213	583.902.800,00	10000	204.006.400,00	1792	7.892.000,00	2115	139.282.800,00	0,00	0,00	3907	147.174.800,00	66,24	72,14	33120	731.077.600,00	66,24	88,24	731.077.600,00							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
44	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	920.000.000,00	20568	195.963.100,00	5000	17.240.600,00	189	0,00	322	2.320.000,00	0,00	0,00	511	2.320.000,00	84316,00	13,46	21079	198.283.100,00	84316,00	21,55	198.283.100,00							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=(12/6)*100%		15=(14/8)*100% KP=14				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	KI	Kr	Rp		
45	2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250	828.481.705,00	5439	21.979.900,00	250	14.520.600,00	53	0,00	47	1.600.000,00	0,00	0,00	100	1.600.000,00	2215,60	11,02	5539	23.579.900,00	2215,60	2,85	23.579.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
46	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	21700	2.037.701.316,00	19.016	643.721.872,00	21700	645.497.000,00	964	2.880.000,00		146.117.650,00	0,00	0,00	964	148.997.650,00	4,53	23,08	983.016	792.719.522,00	4,53	4,53	792.719.522,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
47	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Proyek yang Dilaporkan Melalui LKPM	1725	2.037.701.316,00	974	643.721.872,00	355	645.497.000,00	313	2.880.000,00		146.117.650,00	0,00	0,00	313	148.997.650,00	74,61	23,08	1287	792.719.522,00	74,61	38,90	792.719.522,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
48	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	40	98.588.000,00	20	42.663.544,00	20	89.288.000,00	1	0,00		0,00	0,00	0,00	1	0,00	52,50	0,00	21	42.663.544,00	52,50	43,27	42.663.544,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
49	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	800	687.248.042,00	499	341.090.042,00	400	355.283.000,00		0,00	230	139.001.150,00	0,00	0,00	230	139.001.150,00	91,13	39,12	729	480.091.192,00	91,13	69,86	480.091.192,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
50	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspektasi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125	1.251.865.274,00	123	259.968.286,00	60	200.926.000,00	6	2.880.000,00	11	7.116.500,00	0,00	0,00	17	9.996.500,00	112,00	4,98	140	269.964.786,00	112,00	21,57	269.964.786,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
51	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data yang tersedia tepat waktu	100	812.744.223,00	100	275.179.674,00	100	104.531.800,00	20	0,00	50	4.023.600,00	0,00	0,00	20	4.023.600,00	20,00	3,85	20	279.203.274,00	20,00	20,00	279.203.274,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K		Rp	Ki	Kr	Rp
52	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	2	812.744.223,00	3	275.179.674,00	2	104.531.800,00	1	0,00		4.023.600,00	0,00	0,00	1	4.023.600,00	200,00	3,85	4	279.203.274,00	200,00	34,35	279.203.274,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
53	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didajah, Diteliti dan Dimanfaatkan	20	812.744.223,00	28	275.179.674,00	10	104.531.800,00	2	0,00	3	4.023.600,00	0,00	0,00	5	4.023.600,00	165,00	3,85	33	279.203.274,00	165,00	34,35	279.203.274,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
TOTAL					44.088.220.133,00		12.806.774.896,00		8.202.977.326,00		995.473.774,00		1.259.479.363,00		0,00		2.251.737.337,00		123,11		15.058.512.233,00			15.058.512.233,00			
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program		49,33%	35,04%				
																				Predikat Kinerja Program		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>Pada Triwulan II DPMP/TSP mempromosikan 2 sektor usaha yaitu disektor peternakan (Susu Kambing Sanen) dan sektor industri (Daff Kopi)</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>kegiatan berjalan sesuai perencanaan</p> <p>Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>belum dapat dilaksanakan karena membutuhkan proses yang sangat panjang untuk memberikan insentif ke pelaku usaha</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Untuk Realisasi Investasi Triwulan II belum refist</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>1. ada beberapa kegiatan belum dilaksanakan karena efisiensi anggaran 2. kegiatan pemeliharaan gedung masih tahap perencanaan</p> <p>Tidak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>-</p> <p>Tidak Lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya :</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>-</p> <p>2.18.0.00.0.00.01.0000. 2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>-</p>																											


PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
19701111-198903 1 004

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar menjadi dokumen rencana tahunan yang memuat rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar disusun dengan merujuk pada dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Sesuai rencana pembangunan daerah dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026 yaitu: “KABUPATEN BLITAR BERJAYA DAN BERDAYA”.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Maupun Dunia Usaha;
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani Serta Peka Terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat;
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban, Ketangguhan Bencana serta Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan;

Dari 4 (empat) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah mengacu pada misi ketiga dan keempat.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target
Meningkatkan Iklim Investasi di Kabupaten Blitar	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,25 dan A
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	91
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Blitar, beberapa strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online;
- 3) Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai;
- 4) Penerapan Kebijakan;
- 5) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
- 6) Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2

Indikator Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2025	P-RENJA 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 Dokumen	16 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	25 Orang/bulan	50 Orang/bulan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2025	P-RENJA 2025
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	100 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	4 Jenis
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	7 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	16 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2025	P-RENJA 2025
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	80 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0,02%
	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Investor	2 Investor
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1 Dokumen
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	2 Sektor Usaha
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	10 Kali	2 Kali
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2025	P-RENJA 2025
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	5%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	5%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	10.000 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	50 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	13.700 Milyar	18.200 Miliar
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang dilaporkan melalui LKPM	345 Proyek	345 Proyek
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan	25 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2025	P-RENJA 2025
		Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	10 Dokumen

3.2 Pendanaan

Pada perubahan anggaran tahun 2025, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar merencanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.707.953.363,- (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) dengan rincian DAU/APBD Murni sebesar Rp. . 6.957.341.905,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*), PAK sebesar Rp. 620.377.400 DAK Non Fisik sebesar Rp. 130.234.058,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*) dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Blitar. Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai data yang terinput pada SIPD-RI.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu berdasarkan
P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.724.767.505
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 Dokumen	3.600.000
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.080.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.800.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan	2.769.265.505
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.740.105.505
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.160.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35 orang	186.034.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	35 Orang	186.034.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	277.031.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.861.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	87.571.250
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.533.750

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	10.029.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	2.352.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	131.684.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 jenis	690.942.900
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	164.453.400
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	526.489.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	459.909.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.356.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	79.585.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	376.968.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.337.983.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	116.250.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	72.140.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.149.593.600
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	58.915.600
	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Investor	44.365.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	44.365.600
	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	-
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	1 Dokumen	14.550.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	14.550.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	116.736.600
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi yang difasilitasi	10 Kali	116.736.600
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	116.736.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	350.498.100
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	350.498.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	342.096.900
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	3.960.600
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	4.440.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	21.700 Miliar	368.384.758
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang dilaporkan melalui LKPM	670 Proyek	368.384.758
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	320.783.758
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan Usaha	47.601.000
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	89.370.800
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 Laporan	89.370.800
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	89.370.800
TOTAL PAGU ANGGARAN				7.707.953.363

BAB IV

P E N U T U P

Keberhasilan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai pihak. Sebagai uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja PD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada P-Renja tahun 2025 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan cakupan layanan dan kualitas pelayanan pada masyarakat Kabupaten Blitar dengan strategi memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dan berizin di Kabupaten Blitar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701111 198903 1 004